

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tujuan nasional tersebut dapat tercapai maka perlu adanya kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat kecil. Pembangunan memiliki cakupan definisi yang luas yaitu proses multi dimensi yang memiliki perubahan yang mendasar mencakup struktur sosial, kesenjangan, penanganan kemiskinan serta tetap melihat perubahan akselerasi pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2013). Tujuan inti dari proses pembangunan adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) (Arsyad, 2010).

Pembangunan merupakan upaya perubahan struktural yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Tujuan pembangunan Indonesia itu sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan adalah dengan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan serta penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun demikian tidak semua penduduk memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses dan kegiatan pembangunan, sehingga masih ada yang tertinggal dan tidak terangkat dari kemiskinan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat luas dan kompleks. Salah satunya yaitu masalah pengangguran. Masalah pengangguran muncul sebagai imbas dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Sasana, 2009). Ketidakkampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Perumusan kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada perluasan lapangan kerja perlu dilakukan agar alat-alat dalam kebijakan ekonomi dapat secara efektif mengurangi pengangguran. Oleh karena itu ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian utama pemerintah dari masa ke masa. Permasalahan ini menjadi penting karena erat kaitannya dengan pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masalah ketenagakerjaan menunjukkan bahwa meningkatnya angka pengangguran maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi lainnya yang ada di masyarakat.

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. BPS mendefinisikan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas, sedang bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Penduduk usia kerja tersebut terbagi dalam angkatan kerja yang mencakup bekerja dan mencari kerja

serta bukan angkatan kerja terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga. (BPS, 2010).

Ketenagakerjaan masih menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah, hal ini dapat tercermin pada:

A. Ketenagakerjaan merupakan salah satu sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, sesuai *triple track strategy (pro poor, pro growth, pro job)*.

B. Begitu pula pada RPJMN 2010-2014, sasaran pemerintah pada bidang ketenagakerjaan yaitu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5-6 persen, menyelesaikan masalah ketenagakerjaan antara lain terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, kualitas angkatan kerja yang rendah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda yang tinggi, TPT terdidik (di atas SLTA) masih tinggi.

Berdasarkan catatan badan pusat statistik (BPS) Bukittinggi tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bukittinggi didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebesar 1.930 orang, Universitas sebesar 1.333 orang, Diploma sebesar 392 orang, SMP sebesar 216 orang dan SD sebesar 92 orang. Penyerapan tenaga kerja yang paling banyak berasal dari mereka yang tingkat pendidikannya sekolah menengah atas kebawah, karena mereka cenderung mau bekerja apa saja, berbeda dengan mereka yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi. Sehingga banyak dari mereka yang lulusan Sarjana yang masih belum mempunyai pekerjaan hingga saat ini karena tidak berkualitas atau skill yang dipunyai tidak sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan dan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan para pencari kerja.

Pembangunan di Kota Bukittinggi yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan di Kota Bukittinggi yang tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain terdapat berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal yang harus dihadapi oleh penentu kebijakan di Kota Bukittinggi. Salah satu masalah yang perlu disikapi secara tegas dan bijak yaitu masalah ketenagakerjaan. Kota Bukittinggi dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk yang sedang dan tidak semuanya dapat diserap dalam dunia kerja.

Dari tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah angkatan kerja cenderung mengalami peningkatan yakni sebanyak 51.920 orang pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 60.306 orang. Jumlah angkatan kerja menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang harus diikuti sertakan dalam proses pembangunan yang berarti bahwa angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu menggerakkan proses ekonomi. Ini menggambarkan bahwa dinamika proses pembangunan harus mampu melibatkan seluruh angkatan kerja maka jumlah angkatan kerja yang besar itu dapat menjadi beban bagi pembangunan ekonomi.

Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian terhadap angkatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di kota Bukittinggi menunjukkan bahwa angkatan kerja belum mampu diberdayakan secara optimal oleh berbagai kegiatan ekonomi yang ada.

Bergeraknya aktivitas perekonomian di berbagai sektor di Bukittinggi seharusnya diikuti juga oleh kemampuan masing-masing sektor dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja. Berdasarkan data BPS tercatat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Bukittinggi mengalami fluktuasi. Berfluktuasinya jumlah produk barang dan jasa ini berarti bahwa terjadi fluktuasi jumlah faktor produksi yang digunakan suatu produsen dan salah satunya adalah tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan sifat permintaan tenaga kerja yang *derived demand* yang berarti bahwa permintaan terhadap tenaga kerja merupakan gambaran permintaan terhadap barang dan jasa.

Kenaikan jumlah produk barang dan jasa di Bukittinggi belum diikuti oleh kenaikan permintaan jumlah tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengangguran di Bukittinggi yang berfluktuasi. Dari tahun 2011 sampai tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi di Bukittinggi berfluktuasi setiap tahunnya. Dapat dilihat tahun 2012 pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 6,55% diiringi pula dengan meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja sebesar 6,68%. Namun ditahun 2013-2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,41% namun jumlah penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 3,63% terutama disektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan perhotelan. Menurut Wallis (2002), pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan meningkatkan upah pekerja dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Bukittinggi yang didapat dari hasil Sakernas tahun 2016, jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 56.478 orang. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 25.830 orang; sektor

jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 14.618 orang dan sektor industri pengolahan sebesar 5.867 orang.

Upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja, apabila upah yang diberikan oleh perusahaan dinilai tinggi atau sudah sesuai dengan jasa yang diberikan maka para pencari kerja akan berupaya dengan optimal untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut. Upah merupakan salah satu barometer dalam mengukur berbagai macam kesejahteraan, oleh karena itu pemerintah harus berperan aktif untuk mengatur tentang upah. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah dengan tegas mengatur tentang Pengupahan. Pemerintah daerah telah mengatur tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang merupakan upah minimum berdasarkan wilayah kabupaten/ kota, untuk melindungi upah tenaga kerja dan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

Pertumbuhan upah rill di Bukittinggi menjadi sesuatu yang menjanjikan bagi para pencari kerja di Kota Bukittinggi. Selama Tahun 2010-2017 upah rill di Kota Bukittinggi terdapat kenaikan yaitu rata-rata sebesar 0,18 persen per tahun. Kenaikan ini diharapkan dapat memotivasi pekerja untuk berkontribusi dalam pekerjaannya dengan seoptimal mungkin. Walaupun masih banyak pemilik usaha yang menggaji pekerjanya dibawah upah minimum seperti usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan kontribusi terbesar penyerapan tenaga kerja di Kota Bukittinggi.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja

pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja (Sadono Sukirno,2000). Melalui pengeluaran pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi.

Besarnya pengeluaran pemerintah di Bukittinggi seharusnya menjadi sesuatu yang menjanjikan bagi para pencari kerja di Kota Bukittinggi. Selama Tahun 2010-2017 pengeluaran pemerintah di Kota Bukittinggi terdapat kenaikan yaitu rata-rata sebesar 7,51 persen per tahun. Kenaikan pengeluaran pemerintah ini diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun pada kenyataannya pengeluaran pemerintah banyak digunakan untuk belanja barang dan jasa yang mana tidak banyak menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Riil dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bukittinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bukittinggi tahun 2001-2017?
- 2) Bagaimana pengaruh upah riil terhadap penyerapan tenaga kerja di Bukittinggi tahun 2001-2017?

- 3) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Bukittinggi tahun 2001-2017?
- 4) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah riil dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bukittinggi pada tahun 2001-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bukittinggi tahun 2001-2017
- 2) Menganalisis pengaruh upah riil terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bukittinggi tahun 2001-2017
- 3) Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bukittinggi tahun 2001-2017
- 4) Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah riil dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bukittinggi pada tahun 2001-2017

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan, antara lain :

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Bukittinggi khususnya dalam menentukan strategi kebijakan ketenagakerjaan sehingga di masa mendatang penyerapan tenaga kerja dapat meningkat.

- 2) Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya selain itu dapat memberikan informasi bagi semua pihak berkepentingan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah pemilihan judul yaitu pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Riil dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bukittinggi, perumusan masalah, tujuan, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan dari masing-masing bab yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II akan dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, adapun teori dalam penelitian tersebut yaitu teori ketenaga kerjaan, Pertumbuhan Ekonomi, upah riil, pengeluaran pemerintah dan penjelasan umum mengenai variabel-variabel yang digunakan, penelitian terdahulu, pengembangan konsep kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel-variabel penelitian, penjelasan mengenai jenis dan sumber data, metode analisis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab IV akan dijelaskan mengenai gambaran daerah yang akan dibahas tentang keadaan umum daerah penelitian seperti kondisi geografis, demografis dan kondisi ketenagakerjaan serta ekonomi daerah.

BAB V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pada bab V akan dijelaskan mengenai temuan empiris dan implikasi kebijakan, hasil pengujian model regresi, uji asumsi klasik dan implikasi kebijakan.

BAB VI : PENUTUP

Pada Bab V akan dijelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran setelah dilakukan penelitian. Kesimpulan adalah penjelasan singkat tentang hasil dari penelitian yang telah dirangkum dan saran merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya.

